



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2020

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2021



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap *stakeholders* atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024.

Laporan Kinerja Biro ini disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2020.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memperbaiki kinerjanya, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun program di masa mendatang, sehingga lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Hendri Daud

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan serta hal yang perlu diperbaiki. Pencapaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran. Pada tahun 2020 Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 sedang dalam tahap penyusunan dikarenakan adanya proses perubahan informasi kinerja menindaklanjuti SEB Menteri PPN dan Menteri Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020, Tanggal 24 Juni 2020, Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Berdasarkan hal tersebut, seluruh program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Tahun 2014-2019 dan Tahun 2020-2021), Rencana Kerja, serta Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 sebesar 100,59% dengan 3 (tiga) indikator memperoleh capaian dengan kategori “Memuaskan” dan 2 (dua) indikator memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian kinerja dikategorikan “Memuaskan” jika capaian $\geq 100\%$. Sedangkan capaian kinerja didefinisikan “Sangat Baik” jika capaian berada pada rentang capaian $85\% \leq 99\%$. Rincian capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1			
1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%	79,80%	103,64%
Sasaran 2			
1. Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	85%	81,64%	96,05%
2. Persentase Kepuasan Unit Kerja Terhadap Pelayanan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	80,34%	100,43%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 3			
1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%
2. Persentase Penyelesaian Penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%	94,81%	99,80%

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya Sistem Aplikasi yang dapat mendeteksi adanya permasalahan dan memantau sejauh mana proses penyusunan program kerja, RAB, dan KAK.
2. Penyampaian program kerja, RAB, dan KAK oleh unit kerja tidak tepat waktu.
3. Adanya gangguan teknis pada aplikasi KRISNA.
4. Kekurangtelitian dalam penyusunan RAB, antara lain: ketidakselarasan antara dokumen KAK dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan data dukung lainnya, RAB belum sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), kesalahan perhitungan pada harga satuan maupun total, kurs dollar yang belum disesuaikan dengan data terkini, dan penggunaan akun belum sesuai dengan peruntukannya.
5. Terlambatnya penyampaian konsep DIPA oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
6. Masih terdapat kendala pada penggunaan aplikasi SAKTI.
7. Aplikasi KRISNA belum terintegrasi secara sempurna dengan aplikasi DIPA.
8. Penyampaian data pelaporan pelaksanaan anggaran dari unit kerja yang disampaikan ke Biro Perencanaan dan Keuangan seringkali diterima melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
9. Belum adanya sistem informasi yang dapat mengakomodasi pelaporan capaian pelaksanaan anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Hal ini berdampak pada verifikasi data capaian yang membutuhkan waktu lebih lama.
10. Perubahan tata cara revisi anggaran tahun 2020 sebagai dampak pandemi covid-19.
11. Seringkali dokumen usulan revisi yang diterima unit kerja tidak sesuai dengan format usulan revisi yang seharusnya, sehingga proses revisi anggaran membutuhkan waktu yang lebih lama, karena dokumen usulan revisi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan format yang seharusnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

12. Narahubung yang melaksanakan pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran pada sebagian besar unit kerja berbeda dengan narahubung yang menyusun perencanaan anggaran, sehingga seringkali terjadi pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran tidak sinkron dengan perencanaan anggaran.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

- 1 Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran.
- 2 Perlu adanya pengembangan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) untuk dapat mengakomodir penginputan capaian kinerja sesuai renja secara periodik setiap bulan, dan diintegrasikan dengan SIPT (Sistem Informasi Persuratan Terpadu) untuk menghitung capaian kinerja unit kerja secara tersistem sehingga proses penghitungan capaian kinerja anggaran bisa lebih cepat.
- 3 Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, termasuk perlunya ditunjuk satu orang penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring.
- 4 Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.
- 5 Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator/penanggung jawab/Fasilitasi Operasional anggaran dan pelaksana teknis unit kerja terkait pelaporan pelaksanaan anggaran dan kebijakan revisi anggaran.
- 6 Menginformasikan kepada unit kerja tentang mekanisme pengajuan revisi anggaran beserta dokumen kelengkapan lainnya melalui memorandum sehingga terdapat kesamaan format dokumen pengajuan revisi oleh unit kerja.
- 7 Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi/bimtek terkait agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

8 Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.065.990.020,- atau 84,54% dari pagu setelah revisi terakhir Rp1.260.903.000,-. Persentase realisasi anggaran tersebut diiringi dengan capaian kinerja total sebesar 100,59%, capaian kinerja tersebut masuk ke dalam kategori memuaskan. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dalam kondisi pandemic covid-19, Biro Perencanaan dan Keuangan masih dapat melakukan penyerapan anggaran yang baik dengan diiringi capaian kinerja yang memuaskan pada tahun 2020.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja.....	12
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	36
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Indikator Kinerja Utama	7
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Jan-Sep)	9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Okt-Des)	10
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Tahun 2019-2020	13
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020	15
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020.....	16
Tabel 3.4 Hasil Penilaian Responden pada Sasaran 1 Tahun 2020	18
Tabel 3.5 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2020	20
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020.....	23
Tabel 3.7 Capaian Output dan Outcome Sasaran 2 Tahun 2020	23
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2020	24
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2020	28
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2020	31
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2016-2020	32
Tabel 3.12 Penyampaian Laporan Keuangan.....	33
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2020	34
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2019-2020	35
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2020	36
Tabel 3.16 Sumber Daya Manusia Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016-2020	17
Grafik 3.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2016-2020	21
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2016-2020.....	26
Grafik 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2016-2020.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	2
Gambar 1.2 Analisis SWOT Biro Perencanaan dan Keuangan.....	4
Gambar 2.1 Visi dan Misi Sekretariat Kabinet.....	6
Gambar 2.2 Tujuan Sekretariat Kabinet Poin 4.....	6
Gambar 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja.....	13
Gambar 3.2 Tangkapan Layar Dashboard SIKT2 Januari s.d. September 2020	14
Gambar 3.3 Tangkapan Layar Dashboard SIKT2 Oktober s.d. Desember 2020.....	15
Gambar 3.4 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	18
Gambar 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.....	24
Gambar 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.2.....	28

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai perwujudan upaya penyelenggaraan *good governance*, Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Sekretariat Kabinet yang mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai entitas akuntabilitas kinerja unit kerja (Eselon II) diwajibkan menyusun laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Kepala Biro) kepada Pimpinan Unit Organisasi (Deputi). Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga

PENDAHULUAN

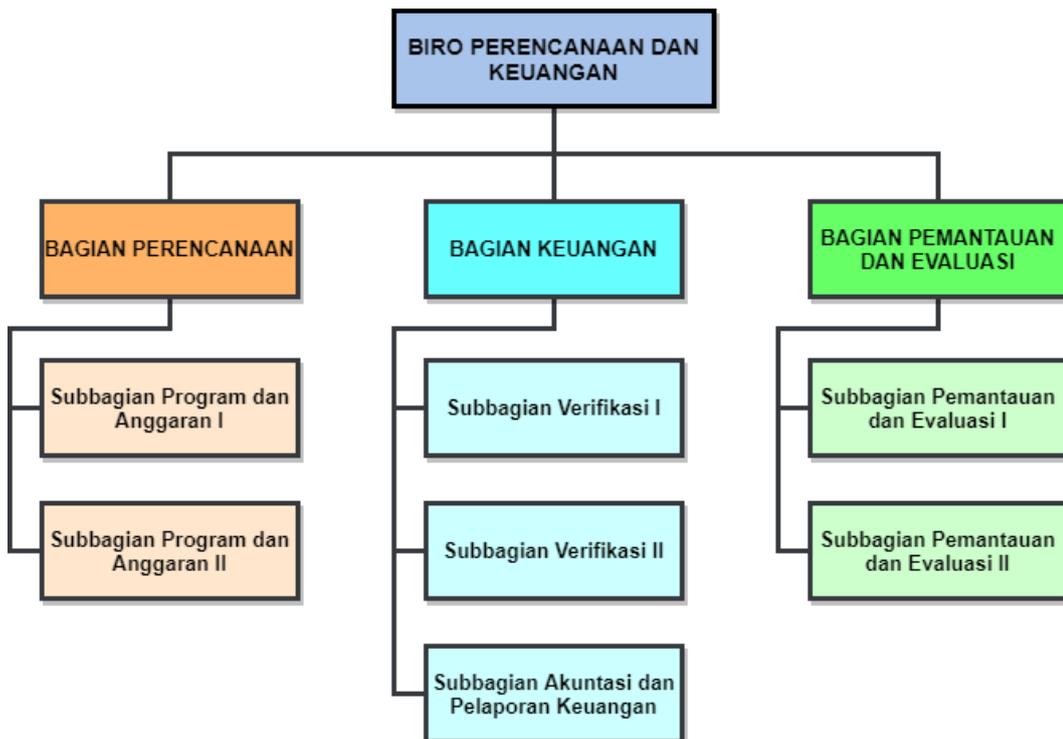
kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, di tahun 2020 Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri 3 (tiga) bagian, yaitu **Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, dan Bagian Pemantauan dan Evaluasi**.

Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan



C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan administratif yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui upaya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet; peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet; dan peningkatan kualitas manajemen keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu Biro Perencanaan dan Keuangan juga sebagai salah satu motor penggerak implementasi SAKIP dimana proses koordinasi penyusunan Rencana Strategis merupakan salah satu tugas pokok dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi, yang memiliki tugas tugas memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Sebagai unit kerja yang melakukan pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, sebab Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membuat analisis SWOT. Analisis SWOT berguna untuk mengidentifikasi *uncertainties* (ketidakpastian) yang mungkin terjadi dan mengantisipasi risiko dari ancaman lingkungan eksternal dan kelemahan internal organisasi sehingga organisasi memiliki kesadaran penuh dalam pengambilan keputusan. Identifikasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian analisis, yaitu analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT di bawah ini merupakan cerminan dari kondisi Biro Perencanaan dan Keuangan

PENDAHULUAN

Sekretariat Kabinet yang dianalisis dengan pendekatan 3 (tiga) unsur, yaitu sumber daya (input), proses, dan hasil (output).

Gambar 1.2
Analisis SWOT Biro Perencanaan dan Keuangan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja dibawah Deputi Bidang Administrasi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Guna mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dengan memperhatikan Rencana Strategis Institusi serta tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sedang dalam tahap penyusunan dikarenakan adanya proses perubahan informasi kinerja menindaklanjuti SEB Menteri PPN dan Menteri Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020, tanggal 24 Juni 2020, Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (result based). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan berlaku efektif untuk TA 2021.

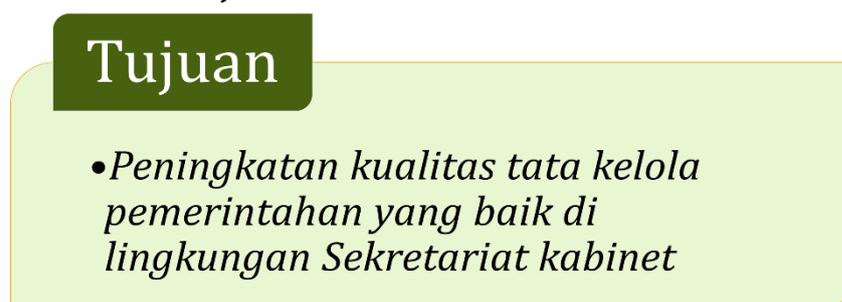
Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet mendukung tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet seperti yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024, yaitu:

Gambar 2.1
Visi dan Misi Sekretariat Kabinet



Fokus Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung Misi Instansi pada “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet”, yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi segenap pejabat/pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh organisasi. Sebagai mesin penggerak Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut dijabarkan melalui tujuan Sekretariat Kabinet poin 4 yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020—2024, yaitu:

Gambar 2.2
Tujuan Sekretariat Kabinet Poin 4



PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan telah selaras dengan sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet yaitu Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet, dengan indikator kinerja yaitu Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet serta Opini Bapan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Penetapan IKU dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2017. Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet mengalami restrukturisasi sesuai dengan Perseskab Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Menindaklanjuti hal tersebut rancangan IKU baru disusun sesuai dengan informasi kinerja hasil RSP yang melalui proses cascading kinerja dari tingkatan K/L ke Eselon I dan Eselon II dengan pendampingan dari Bappenas dan DJA Kemenkeu. Indikator Kinerja Utama (IKU) baru tersebut belum ditetapkan karena menunggu hasil revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 untuk ditetapkan.

Meskipun demikian, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran dari Biro Perencanaan dan Keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan kegiatan yang ingin dicapai oleh Biro Perencanaan dan Keuangan selama 5 (lima) tahun mendatang adalah menyajikan layanan perencanaan dan keuangan dengan kualitas terbaik yang berarti ada peningkatan kualitas layanan disetiap tahunnya.

Perbandingan IKU Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 dengan IKU baru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Indikator Kinerja Utama

IKU Perseskab 1 Tahun 2017	Draf IKU Baru	Keterangan
1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	Tetap

PERENCANAAN KINERJA

IKU Perseskab 1 Tahun 2017	Draf IKU Baru	Keterangan
2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tetap
3. Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material.	-	Dihapus
	3. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	Baru
4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Tetap
5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi anggaran	Perubahan nomenklatur

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja juga dilengkapi dengan jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pencapaian kinerja. Hal ini menandai adanya anggaran berbasis kinerja dalam suatu organisasi, dimana anggaran disusun berdasarkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Sebagai salah satu unit kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pada awal tahun 2020 penyusunan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan masih mengacu pada IKU Perseskab Nomor 1 Tahun

PERENCANAAN KINERJA

2017. Adanya Restrukturisasi atau Perubahan SOTK Sekretariat Kabinet tahun 2020 dan Pelantikan yang dilaksanakan pada akhir September 2020, maka berimplikasi pada perlunya penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sesuai tugas fungsi baru yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Perubahan ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 mengacu pada Informasi Kinerja dalam Renstra Perseskab 2 Tahun 2020 dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai SOTK baru.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada awal tahun dengan penetapan tanggal 2 Januari 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Jan-Sep)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%
2.	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	80%
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		2. Persentase penyelesaian penerbitan SPM yang diselesaikan secara akurat	100%

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan penetapan tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Okt-Des)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%
2.	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	80%
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		2. Persentase penyelesaian penerbitan SPM yang diselesaikan secara akurat	95%

Guna mewujudkan kinerja yang sudah diperjanjikan, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh pagu alokasi anggaran awal sebesar Rp2.600.000.000,00. Untuk penanganan pandemi covid19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan ditetapkan PP Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian APBN TA 2020, yang berimplikasi pada pemotongan alokasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp1.339.097.000,00 atau sebesar 51.5 persen dari alokasi anggaran awal tahun. Sehingga, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sebesar

PERENCANAAN KINERJA

Rp1.260.903.000,00, atau sebesar 48.5 persen dari pagu alokasi anggaran awal tahun.

Selain itu, pada tahun 2020 perubahan SOTK dan penyusunan Renstra 2020-2024 tidak diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020. Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan per 1 Oktober sudah terealisasi sebesar Rp616.827.600,00 sehingga pagu yang diperjanjikan dalam PK perubahan adalah sebesar Rp644.075.400,00 yang merupakan pagu anggaran penghematan dikurangi realisasi anggaran per 30 september 2020. Dengan demikian, dalam rangka pencapaian sasaran strategis dengan pagu anggaran yang tersedia diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan layanan perencanaan, layanan pemantauan dan evaluasi, serta layanan manajemen keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

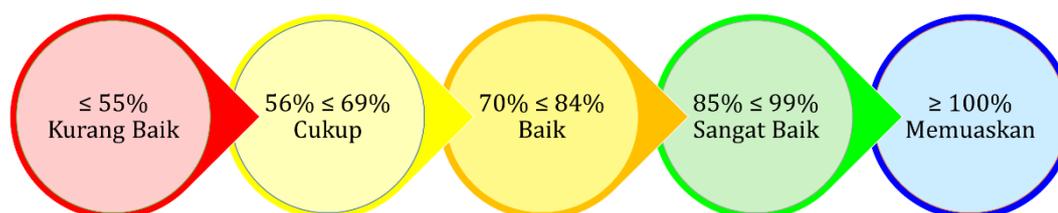
Akuntabilitas merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel. LKj Biro Perencanaan dan Keuangan disusun sebagai komitmen dan upaya Biro untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam susunan organisasi Sekretariat Kabinet. Pada awal periode Januari – September 2020 peran tersebut direpresentasikan melalui dukungan terhadap 1 (satu) program **“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet”** dan 1 (satu) kegiatan yaitu **“Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet”**. Dengan adanya revisi Rencana Strategis Instansi, pada periode Oktober – Desember 2020 peran tersebut direpresentasikan melalui dukungan terhadap 1 (satu) program **“Dukungan Manajemen”** dan 1 (satu) kegiatan yaitu **“Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet”**. Pelayanan Biro mencakup seluruh manajemen/pengelolaan keuangan, dimulai dari proses perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, pelayanan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan anggaran, sampai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan kepada pimpinan melalui Laporan Capaian Rencana Aksi Penetapan Kinerja Triwulanan. Kategori capaian kinerja yang digunakan pada tahun 2020 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu:

Gambar 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja



Tahun 2020 merupakan tahun transisi peralihan dari masa Kabinet Kerja (Periode 2015-2019) ke masa Kabinet Indonesia Maju (Periode 2020-2024) sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II bahwa terdapat 2 (dua) dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yaitu PK awal dan PK Perubahan, maka uraian pada bagian ini akan memadukan penjelasan untuk capaian Sasaran Strategis yang sama dengan indikator awal untuk periode Januari – September dan indikator baru periode Oktober – Desember. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan PK awal periode Januari – September 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Tahun 2019 – 2020

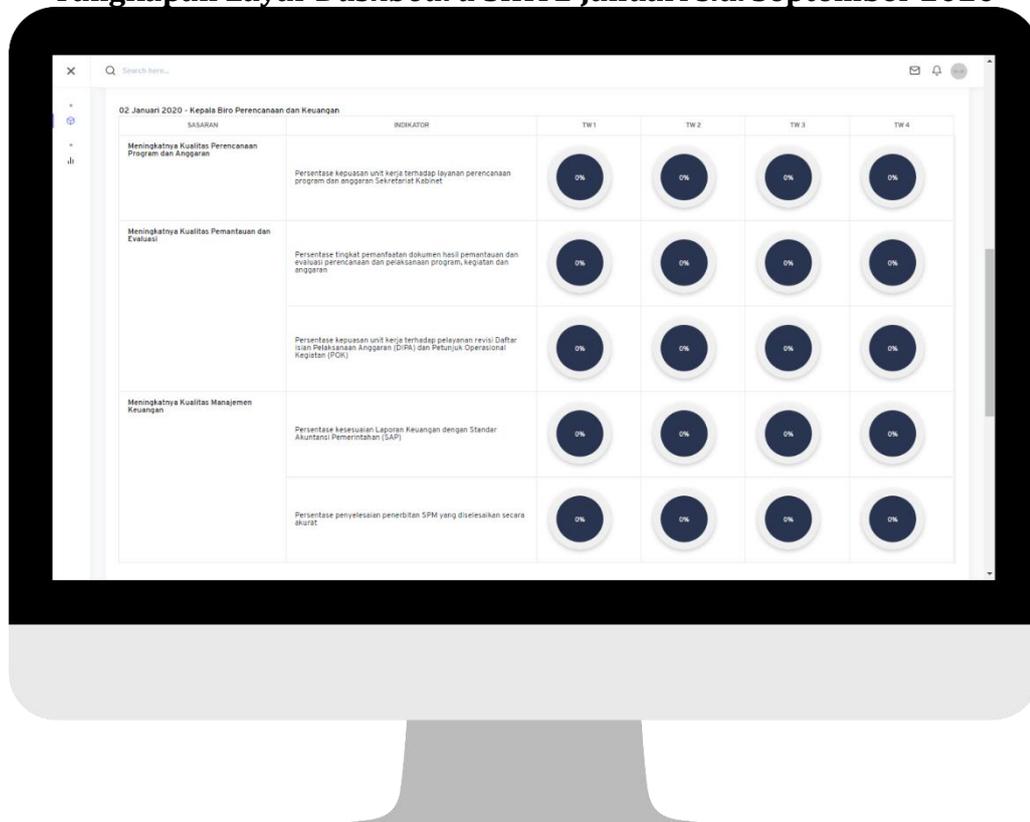
TAHUN 2019		TAHUN 2020 (Jan-Sep)		TAHUN 2020 (Okt-Des)	
Indikator	Realisasi	Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77,88%	Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%	Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%
Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	98,41%	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	100%	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2019		TAHUN 2020 (Jan-Sep)		TAHUN 2020 (Okt-Des)	
Indikator	Realisasi	Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	80,30%	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%
Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	78,61%	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%

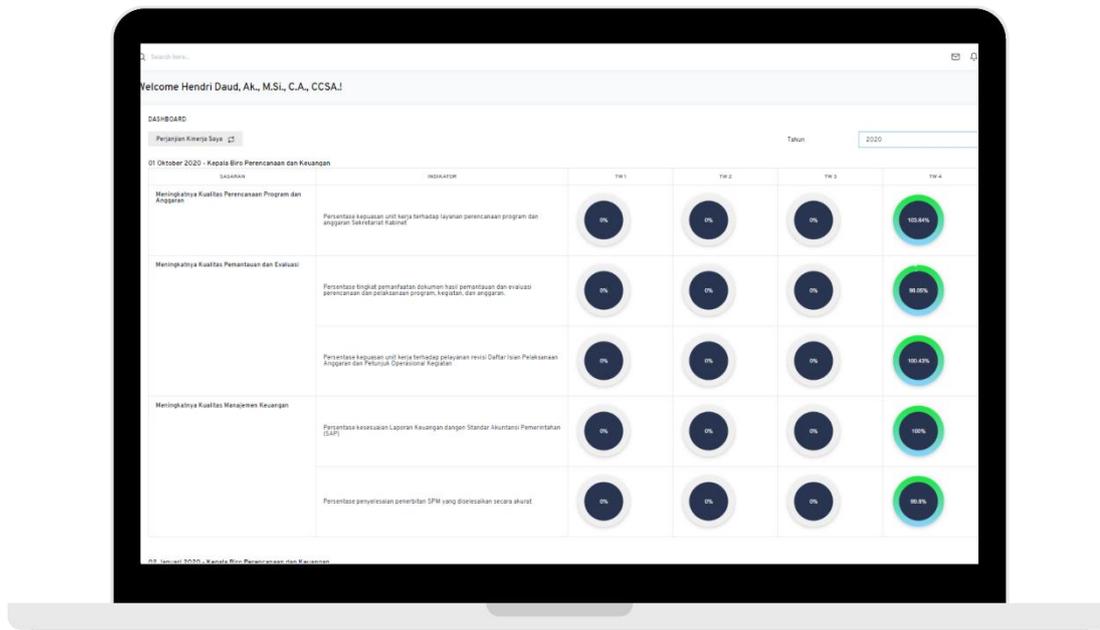
Bentuk tanggungjawab Biro Perencanaan dan Keuangan atas apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, dilaporkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT2). Tangkapan Layar *dashboard* SIKT2 periode Januari s.d. September 2020 sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 3.2
Tangkapan Layar *Dashboard* SIKT2 Januari s.d. September 2020



Tangkapan Layar *dashboard* SIKT2 periode Oktober s.d. Desember 2020 sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 3.3
Tangkapan Layar *dashboard* SIKT2 Oktober s.d. Desember 2020



Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan untuk setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam PK dapat diuraikan berdasarkan masing-masing sasaran kegiatan.

Sasaran
1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Capaian kinerja pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator utama, yaitu:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%

Uraian mengenai capaian tersebut dapat dilihat dari Tabel Indikator, Target, Realisasi dan Persentase Capaian berikut:

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<u>Output:</u>				
1. Program Kerja	Dok	1	1	100%
2. Renja	Dok	1	1	100%
3. POK	Dok	1	1	100%
4. RKA – KL	Dok	1	1	100%
5. DIPA	Dok	1	1	100%
6. Nota Keuangan	Dok	1	1	100%
7. Bahan Raker/RDP	Dok	1	1	100%
8. Renstra	Dok	1	1	100%
<u>Outcome :</u>	%	77	79,8%	103,64%
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet				



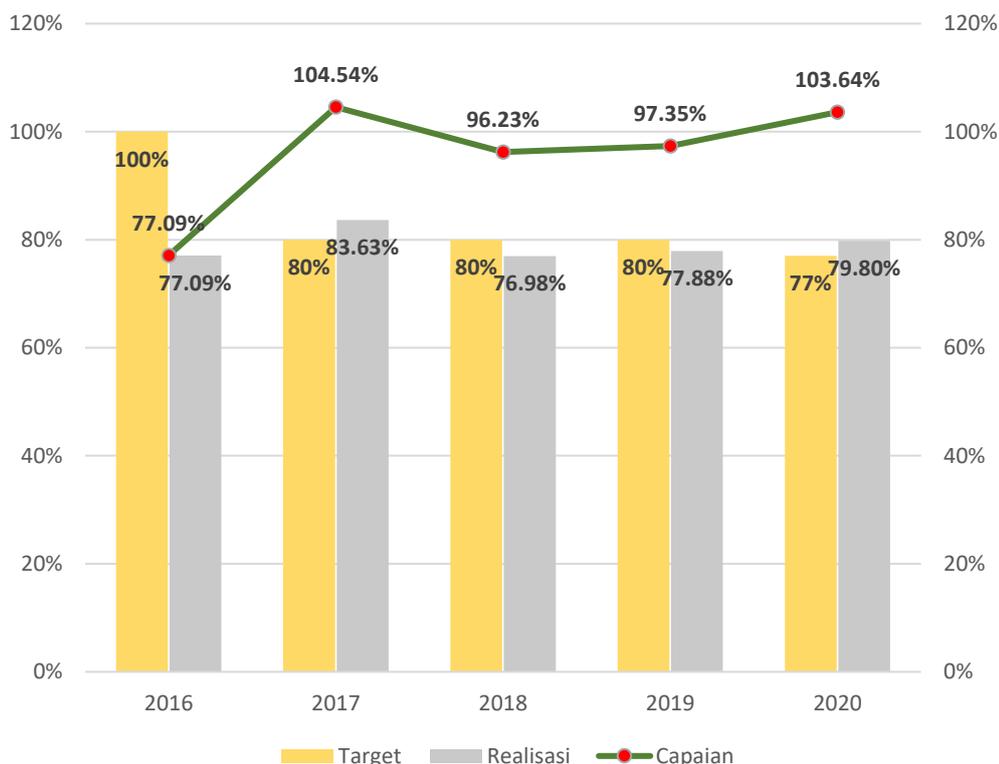
1.1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Indikator kinerja sasaran 1 adalah “Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet”. Sejak tahun 2014 indikator kepuasan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet telah digunakan untuk mengukur kualitas layanan perencanaan program dan anggaran. Grafik berikut ini menggambarkan capaian dari indikator dimaksud sejak tahun 2015 hingga tahun 2020.

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016-2020

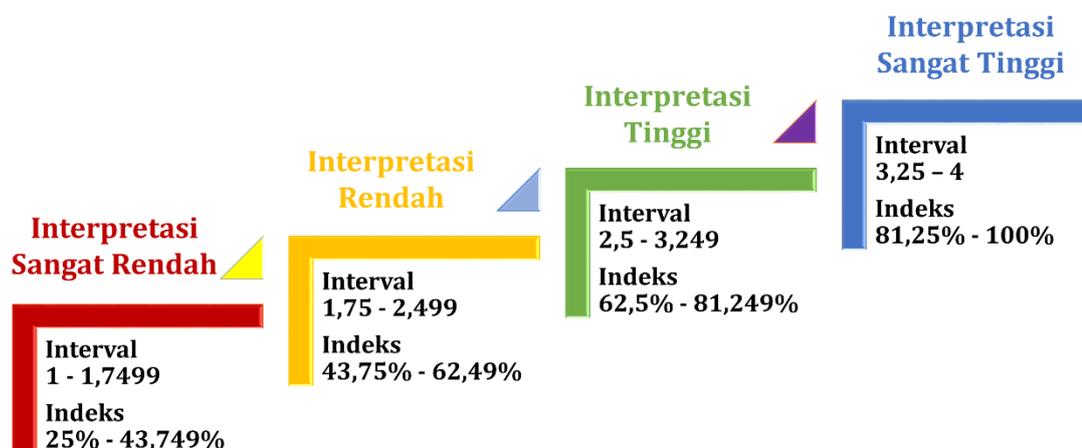


Grafik di atas mencerminkan bahwa trend realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1, jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019 dan 2020-2024, walaupun capaian setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian target menjadi 77%, sesuai dengan rata-rata hasil capaian yang diperoleh selama tahun 2016-2019.

Interpretasi indeks atas hasil pengukuran tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet menggunakan kriteria penilaian berikut ini:

AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.4
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja



Untuk menghitung tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, pada tanggal 18 s.d. 23 Desember 2020 dilaksanakan survei secara online bagi 105 (seratus lima) responden.

Kuesioner tersebut berjumlah 11 (sebelas) pertanyaan terbagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*); Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*); Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*); Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*); dan Sikap dalam pelayanan (*Empaty*).

Gambaran atas hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Hasil Penilaian Responden pada Sasaran 1 Tahun 2020

Pernyataan	Hasil Survei
Ketanggapan dalam pelayanan (<i>Responsiveness</i>)	
a. Ketanggapan pelayanan	3,18
b. Kecepatan pelayanan	3,19
c. Kemudahan pelayanan	3,24
Keandalan dalam pelayanan (<i>Reliability</i>)	
a. Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan	3,20
b. Ketepatan pelayanan	3,18
Kepastian dalam pelayanan (<i>Assurance</i>)	
a. Kepastian pelayanan	3,21
b. Keakuratan pelayanan	3,16
Sikap dalam pelayanan (<i>Empathy</i>)	
a. Keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan	3,30
b. Kepedulian pegawai dalam pelayanan	3,24
Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (<i>Tangible</i>)	
a. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan	3,15
b. Kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan	3,07
Rata-rata	3,19

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Tabulasi penilaian responden terhadap Layanan penyusunan program dan anggaran diatas, melalui perhitungan indeks mendapat nilai sebesar **3,19 (79,80%)** atau berada di kategori **“Tinggi” (2,50 – 3,249)** Adapun target survei pada Rencana Kerja tahun 2020 adalah sebesar 77% sehingga capaian survei adalah sebesar **103,64%**.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2019, dimana diperoleh hasil sebesar 77,88%, maka pada tahun 2020 tingkat kepuasan yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 1,92%. Setelah menghimpun, mengolah dan melakukan analisis terhadap hasil kuesioner diatas dapat dijelaskan bahwa aspek Sikap Dalam Pelayanan (Empathy) yaitu keramahan pegawai dalam melayani pertanyaan dari unit kerja mendapatkan indeks tertinggi yaitu sebesar 3,30. Sedangkan Sarana dan Prasarana Fisik (Tangible) mendapatkan tingkat kepuasan yang terendah yaitu 3,07 untuk tingkat kepuasan terhadap kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei adalah:

1. Kapasitas/pengetahuan pegawai masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran.
2. Koordinasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan serta dengan unit kerja di Sekretariat Kabinet khususnya dengan Fasilitasi Operasional, perlu lebih ditingkatkan sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran di Sekretariat Kabinet dapat berjalan dengan lancar.
3. Penyampaian informasi terkait perencanaan program dan anggaran kepada unit kerja seperti jadwal kegiatan (time table), Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan, kebijakan, dll perlu lebih ditingkatkan sehingga terwujud pemahaman yang baik pada unit kerja terkait proses penyusunan dokumen program dan anggaran.

Selain masukan diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, yaitu:

1. Belum adanya Sistem Aplikasi yang dapat mendeteksi adanya permasalahan dan memantau sejauh mana proses penyusunan program kerja, RAB, dan KAK.
2. Penyampaian program kerja, RAB, dan KAK oleh unit kerja tidak tepat waktu.
3. Adanya gangguan teknis pada aplikasi KRISNA.

AKUNTABILITAS KINERJA

4. Kekurangtelitian dalam penyusunan RAB, antara lain ketidakselarasan antara dokumen KAK dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan data dukung lainnya, RAB belum sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), kesalahan perhitungan pada harga satuan maupun total, kurs dollar yang belum disesuaikan dengan data terkini, dan penggunaan akun belum sesuai dengan peruntukannya.
5. Terlambatnya penyampaian konsep DIPA oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
6. Masih terdapat kendala pada penggunaan aplikasi SAKTI.
7. Aplikasi KRISNA belum terintegrasi secara sempurna dengan aplikasi DIPA.

Berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang, sebagai upaya-upaya perbaikan terkait dengan hasil survei yaitu:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas.
2. Akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada para koordinator dan pelaksana teknis.
3. Melakukan penyebaran informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan memorandum.

Berikut uraian tentang akuntabilitas keuangan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran”** dilihat dari aspek persentase serapan, penghematan dana maupun efisiensi dan efektifitas penggunaan anggarannya.

Tabel 3.5
Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2020

No	%Realisasi Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1.	79,80%	Jumlah dokumen perencanaan program: 1. Program Kerja 2. Renja 3. POK 4. RKA – KL 5. DIPA 6. Nota Keuangan 7. Bahan Raker/ RDP POK 8. Renstra	<i>Output</i>	Dok	8	8
			<i>Input</i>	Rupiah	610.651.000	512.227.320
			<i>Input rata-rata per output</i>	Rupiah	76.331.375	64.028.415
1. Penghematan dana = Rp98.423.680 (0.19%) 2. Efisiensi = Rp12.302.960 per output (0,19%) 3. Efektivitas = % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)						

AKUNTABILITAS KINERJA

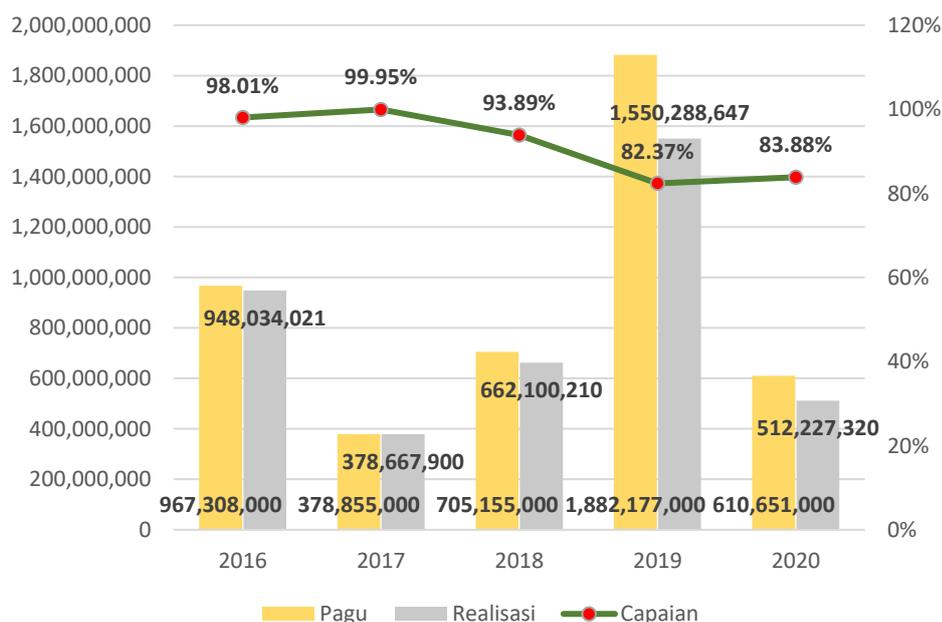
Pencapaian sasaran 1 diwujudkan melalui kegiatan Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, dan output yang digunakan untuk mengukur efisiensi anggaran dari sasaran ini adalah:

1. Program Kerja;
2. Rencana Kerja;
3. POK;
4. RKA-KL;
5. DIPA;
6. Nota Keuangan;
7. Bahan Raker/RDP; dan
8. Rencana Strategis.

Proses kegiatan tersebut didukung anggaran sebesar Rp610.651.000 (input) dan terealisasi sebesar Rp512.227.320 atau 83,88% dari rencana pagu anggaran yang telah tersedia. Walaupun realisasi anggaran hanya sebesar 83,88% namun seluruh output yang ditargetkan dapat tercapai. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan mengingat adanya pandemi Covid-19.

Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran 1 sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1
Tahun 2016-2020



Secara umum, capaian kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet**” adalah sebesar 103,64% (Memuaskan), dihitung dari realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja sebesar 79,80% dibagi dengan target 77%.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi

Capaian kinerja pada sasaran 2 diukur melalui 2 (dua) indikator utama pada tahun 2020, yaitu:

Indikator Utama 1 Indikator 2.1 dengan Target 85%

- Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

Indikator Utama 2 Indikator 2.2 dengan Target 80%

- Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pengukuran capaian kedua indikator utama dimaksud diukur melalui survei. Survei untuk mengukur capaian kinerja unit-unit kerja di Kedepatian Bidang Administrasi dilaksanakan mulai tanggal 19 Desember 2020 s.d. 5 Januari 2021 dengan memo pengantar nomor M.0695/Adm-3/12/2020 kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat kabinet. Survei dilaksanakan secara daring (*online*) bagi 105 responden.

Survei terkait pemanfaatan dokumen terbagi menjadi 4 (empat) kategori penilaian, yaitu:

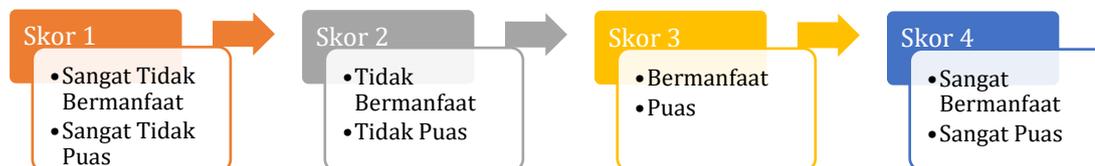
- a. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam perbaikan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan kinerja;
- b. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran;
- c. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi; dan
- d. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk peningkatan kinerja.

Sedangkan survei kepuasan pelayanan revisi DIPA/POK DIPA terbagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*);

AKUNTABILITAS KINERJA

Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*); Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*); Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*); dan Sikap dalam pelayanan (*Empaty*).

Kuesioner dalam survei pemanfaatan dokumen dan kepuasan pelayanan revisi DIPA/POK DIPA dimaksud menggunakan 4 (empat) pilihan skala, dengan skor masing-masing jawaban sebagai berikut:



Adapun hasil capaian kinerja sasaran 2 pada kedua indikator sesuai penghitungan berdasarkan hasil survei dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	81,64%	96,05%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	80,34%	100,43%

Apabila dirinci secara lebih lanjut, capaian atas sasaran 2 dimaksud merupakan capaian atas outcome dan output sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Output dan Outcome Sasaran 2 Tahun 2020

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<u>Output:</u>				
1. Laporan e-monev PP 39 Bappenas	Dok	1	1	100%
2. Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kemenkeu (SMART)	Dok	1	1	100%
3. Laporan Pelaksanaan Revisi	Dok	1	1	100%
4. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kabinet	Dok	2	2	100%
5. Dokumen Revisi Anggaran yang Disetujui	%	100	100	100%
<u>Outcome:</u>				
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	%	85	81,64	96,05%

AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	%	80	80,34	100,43%

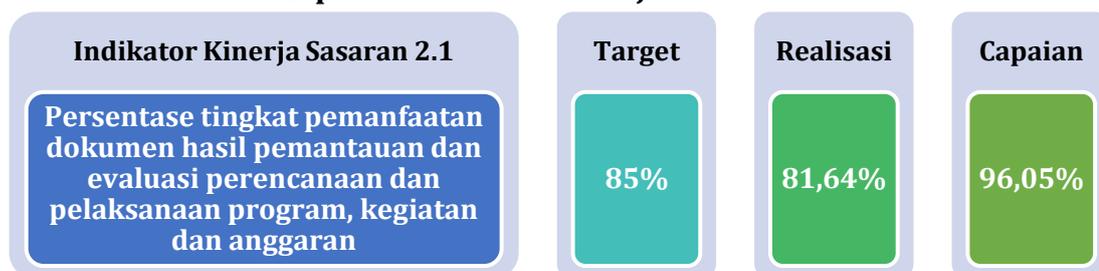
2.1.

Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran

Indikator kinerja pertama dari sasaran 2 berupa “Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran” dengan target sebesar 85%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga indikator pertama (sasaran 2.1.) dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1



Berdasarkan gambar 3.3 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi indikator kinerja sasaran 2.1 sebesar 81,64%, jika dibandingkan dengan target sebesar 85%, diperoleh persentase capaian sebesar 96,05%. Adapun rincian capaian sasaran 2.1 berdasarkan hasil survei tanggal 5 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2020

Kategori Pemanfaatan	Dokumen Capaian Pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kabinet	Total Indeks (%)
Pemanfaatan Dokumen/Laporan dalam Perbaikan Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja	81,90%	80,95%	81,43%

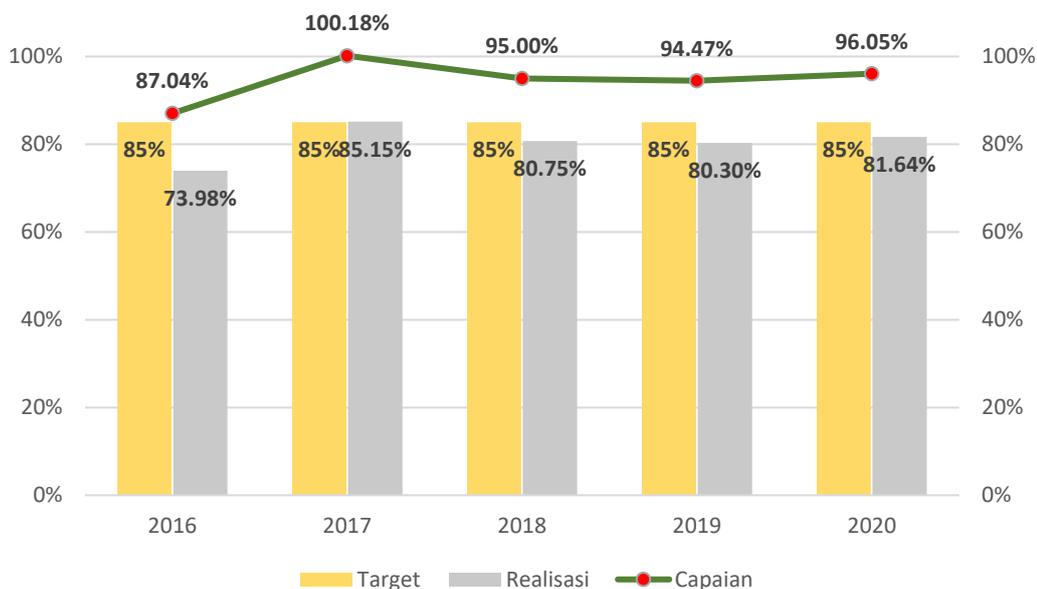
AKUNTABILITAS KINERJA

Kategori Pemanfaatan	Dokumen Capaian Pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kabinet	Total Indeks (%)
Pemanfaatan Dokumen dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran	81,67%	81,19%	81,43%
Pemanfaatan Dokumen untuk Menilai dan Memperbaiki Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Organisasi	82,38%	81,67%	82,02%
Pemanfaatan Dokumen untuk Peningkatan Kinerja	81,67%	81,67%	81,67%
Rata-Rata			81,64%

Berdasarkan hasil survei, kategori pemanfaatan dokumen untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi memperoleh indeks tertinggi yaitu sebesar 82,02%. Sedangkan secara rata-rata indeks pemanfaatan dokumen memperoleh nilai **81,64%** masuk kedalam kriteria interpretasi “**sangat tinggi**”. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2020 sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi oleh pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Indikator kinerja terkait tingkat pemanfaatan dokumen hasil evaluasi sudah digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2009 s.d. 2020. Namun tentu disesuaikan dengan dinamika organisasi yang mengalami perubahan struktur, tata kerja serta sumber daya manusia. Berikut akan dijabarkan target dan capaian indikator kinerja sasaran 2.1. sejak tahun 2016 s.d. 2020.

Grafik 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2016 s.d. 2020



Apabila dilihat pada grafik di atas, persentase capaian sasaran 2.1 mengalami tren penurunan sejak tahun 2018 s.d. tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 persentase capaian kinerja sasaran 2.1. mengalami peningkatan sebesar 1,58% jika dibandingkan persentase capaian tahun 2019.

Terkait peningkatan capaian persentase kinerja sasaran 2.1. yang sebesar 1,58% beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan sebagai faktor pendukung peningkatan, antara lain:

- a. Laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi di tahun 2020 sudah menyajikan analisis yang lebih komprehensif dengan melihat berbagai aspek baik aspek keuangan maupun aspek non keuangan, apabila dibandingkan dengan laporan/dokumen tahun sebelumnya. Penyajian pelaporan sudah mencakup realisasi anggaran dan realisasi capaian kinerja level strategis, level program dan level kegiatan. Hal ini berdampak pada analisa yang dihasilkan lebih luas dan mendalam sehingga secara tidak langsung dapat berimplikasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan maupun perbaikan masa mendatang.
- b. Meningkatnya frekuensi penerbitan memorandum/laporan pemantauan dan evaluasi di tahun 2020.
- c. Meningkatnya kecepatan waktu penerbitan waktu laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi di tahun 2020.
- d. Perbaikan tampilan dan design laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi sehingga lebih menarik dan menyenangkan untuk dibaca.

Meskipun tren tahun 2020 mengalami peningkatan, namun peningkatan ini belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 85%. Perlu analisis lebih

lanjut terkait faktor penyebab realisasi indikator sasaran 2.1 tidak pernah tercapai sejak tahun 2018. Perlu dipertimbangkan kembali terkait besaran target yang sudah ditetapkan, apakah target yang ditetapkan terlalu tinggi.

Namun demikian, berdasarkan jawaban responden atas kuesioner pada kolom saran pada survei Januari 2021, diinventarisasi beberapa saran yang membangun dari unit kerja guna perbaikan kinerja sasaran 2.1., antara lain:

- a. Perlunya untuk menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran secara rutin setiap bulan yang disertai penyelenggaraan rapat pembahasan dengan unit kerja pelaksana anggaran, guna mengawal pelaksanaan kinerja anggaran sepanjang tahun.
- b. Perlunya pemberian bimbingan dan pelatihan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- c. Perlunya berkoordinasi dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan RB terkait penyusunan kamus definisi rekomendasi serta cara penghitungannya yang menjadi acuan bagi unit kerja substansi; dan
- d. Perlunya berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Teknologi guna pembangunan Sistem Informasi Program dan Anggaran yang terintegrasi dan *realtime* di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terkait saran tersebut, ditahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran secara periodik dan mengirimkan laporan dimaksud kepada unit kerja pelaksana kegiatan disertai dengan pembahasan dalam bentuk rapat secara intensif.
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sehingga unit kerja dapat melakukan evaluasi mandiri dalam lingkup internal unit kerja;
- c. Berkoordinasi dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan kamus definisi rekomendasi serta cara penghitungannya yang menjadi acuan bagi unit kerja substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- d. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Teknologi guna pembangunan Sistem Informasi Program dan Anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2.2.

Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan

Indikator kinerja kedua dari sasaran 2 yaitu “Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk

AKUNTABILITAS KINERJA

Operasional Kegiatan” dengan target 80%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga indikator kedua (2.2) dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.6

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.2



Apabila dirinci capaian sasaran 2.2. berdasarkan hasil survei bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2020

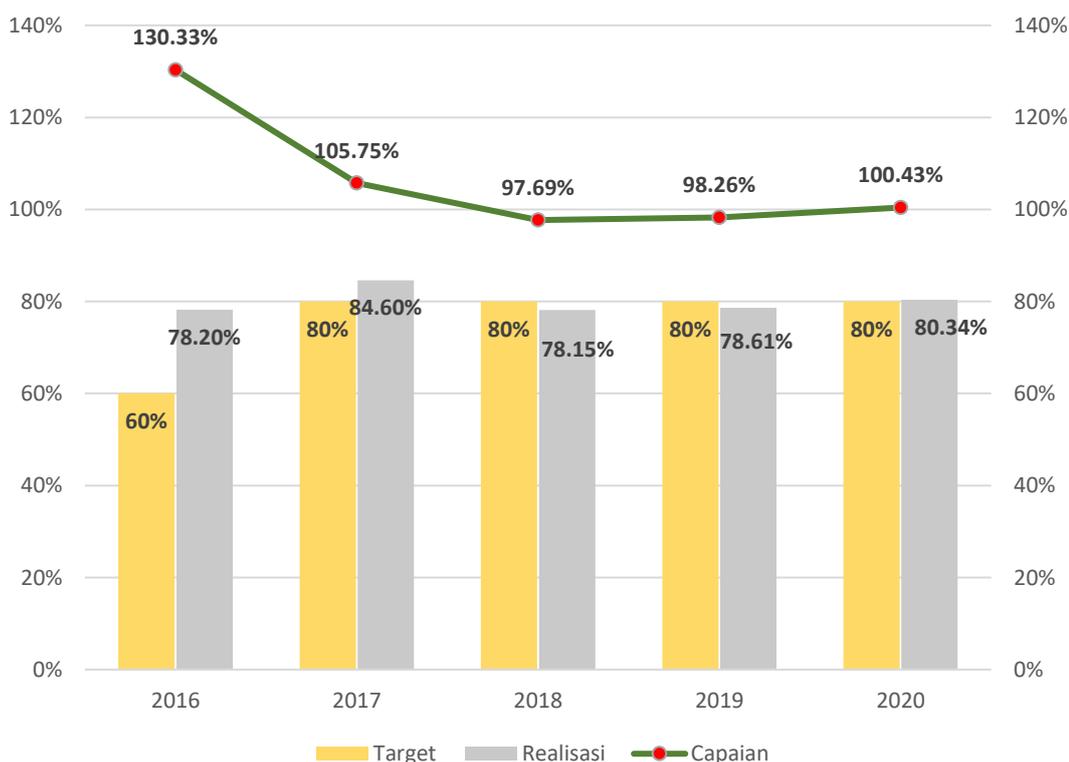
No.	Pernyataan	Indeks Kepuasan (%)	
Ketanggapan dalam pelayanan (<i>responsiveness</i>)			
a.	Ketanggapan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	81,43%	81,35%
b.	Kecepatan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	80,71%	
c.	Kemudahan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	81,90%	
Keandalan dalam pelayanan (<i>reliability</i>)			
a.	Kemampuan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	80,48%	80,36%
b.	Ketepatan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	80,24%	
Kepastian dalam pelayanan (<i>assurance</i>)			
a.	Kepastian pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	80,24%	79,64%
b.	Keakuratan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	79,05%	
Sikap dalam pelayanan (<i>Empathy</i>)			
a.	Keramahan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	83,10%	82,26%
b.	Kepedulian pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	81,43%	
Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (<i>tangible</i>)			
a.	Ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	79,05%	78,10%
b.	Kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	77,14%	
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan Penyusunan Revisi DIPA dan POK DIPA			80,34%

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil survei, kategori sikap dalam pelayanan (*emphaty*) memperoleh indeks tertinggi yaitu sebesar 82,26%. Kategori sarana dan prasarana dalam pelayanan (*tangible*) memperoleh indeks terendah yaitu sebesar 78,10%. Sedangkan secara rata-rata indeks kepuasan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA memperoleh nilai **80,34%** masuk kedalam kriteria interpretasi “**tinggi**”. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan yang diberikan dalam penyusunan dan penyelesaian revisi DIPA dan POK DIPA tahun 2020 memuaskan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Indikator kinerja terkait kepuasan pelayanan penyusunan DIPA dan POK DIPA sudah digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berikut akan dijabarkan perbandingan target dan capaian indikator kinerja sasaran 2.2. sejak tahun 2016 s.d. 2020.

Grafik 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2016 s.d. 2020



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan atas layanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA menurun di tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019 hingga tahun 2020, peningkatan sebesar 1,73% pada tahun 2020. Kenaikan capaian persentase kinerja sasaran 2.2. yang sebesar 1,73% bisa dicapai karena adanya beberapa upaya yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan, antara lain:

AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja secara intensif baik melalui media komunikasi seperti memorandum, email, telepon, sms, *Whatsapp*, maupun melalui penyelenggaraan rapat.
- b. Menyenggarakan rapat bersama unit kerja segera setelah ditemui adanya permintaan/permasalahan terkait revisi DIPA/POK DIPA.
- c. Bersikap proaktif apabila ditemui adanya permintaan/permasalahan terkait revisi DIPA/POK DIPA.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja kedua pada sasaran tiga pada tahun 2020 telah dilaksanakan 28 (dua puluh delapan) kali revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau 127 (dua ratus tujuh belas) kali usulan revisi dari unit kerja yang diproses; 2 (dua) kali revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran; dan 7 (tujuh) kali revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

Adapun hasil inventarisasi saran berdasarkan hasil survei bulan Januari 2020 terkait permasalahan dalam pencapaian sasaran 2.2. adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan unit kerja khususnya tentang jadwal/deadline yang harus dipenuhi agar tidak mendesak;
2. Perlunya meningkatkan kecepatan dalam pelayanan dan kepastian waktu penyelesaian pelaksanaan revisi anggaran;
3. Bimtek penyusunan dan revisi anggaran sesuai ketentuan PMK tetap dilakukan secara berkelanjutan mengingat adanya pergantian pegawai yang ditunjuk untuk menyiapkan dokumen terkait; dan
4. Perlunya *benchmarking* ke Kementerian/Lembaga lain terkait kebijakan program dan kegiatan di masa Pandemi Covid 19.

Terkait saran tersebut, ditahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan beberapa hal antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja tentang batas waktu penyampaian dokumen yang disampaikan baik dalam memorandum maupun secara informal;
2. Mengkoordinasikan dengan unit kerja tentang estimasi penyelesaian pelaksanaan revisi anggaran dengan menjelaskan pertimbangan-pertimbangannya guna meningkatkan kecepatan dalam pelayanan;
3. Mengadakan bimtek revisi anggaran sesuai ketentuan PMK yang berlaku; dan
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian pengampu kebijakan dan *benchmarking* ke Kementerian/Lembaga lain terkait kebijakan program dan kegiatan di masa Pandemi Covid 19.

**Sasaran
3**

Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan

Salah satu fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan adalah penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi tersebut adalah melaksanakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengoordinasian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Sasaran strategis kedua Biro Perencanaan dan Keuangan adalah **“Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan”**. Guna menilai pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja sebagai acuan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator kinerja tersebut adalah:

1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat.

Adapun capaian indikator kinerja selama tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

3.1.

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

**Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2020, kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ditargetkan sebesar 100%, dan secara keseluruhan target tersebut terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet tahun 2019 Nomor: 39B/HP/XVI/05/2020 dan 39C/HP/XVI/05/2020, tanggal 15 Mei 2020, BPK memberikan opini bahwa

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya, perbandingan target dan capaian kinerja sasaran terkait kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah selama 5 lima tahun terakhir (Tahun 2016-2020) dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun				
	2020	2019	2018	2017	2016
Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah					
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja terkait kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena sistem dan

AKUNTABILITAS KINERJA

koordinasi penyusunan laporan keuangan yang ada baik internal dan eksternal sudah baik.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan bertanggungjawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan. Selain kesesuaian dengan SAP, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan juga menjadi tolak ukur dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Adapun selama tahun 2020, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Penyampaian Laporan Keuangan

No	Laporan Keuangan	Dasar Penetapan Waktu Penyampaian	Target Waktu	Realisasi Penyampaian	Status
1	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (<i>Unaudited</i>) Tahun 2019	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-2157/PB/2019, tanggal 31 Desember 2019	21 Februari 2020	13 Februari 2020	Tepat waktu
2	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (<i>Audited</i>) Tahun 2019	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-363/PB/2020, tanggal 24 April 2020	7 Mei 2020	21 April 2020	Tepat waktu
3	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-555/PB/2020, tanggal 30 Juni 2020	30 Juli 2020	24 Juli 2020	Tepat waktu
4	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Triwulan III	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-757/PB/2020, tanggal 30 September 2020	2 November 2020	27 oktober 2020	Tepat Waktu

Laporan Keuangan TA 2020 telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Sekretariat

AKUNTABILITAS KINERJA

Kabinet, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu Satuan Kerja pada pemerintah pusat merupakan entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat memiliki peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Sekretariat Kabinet selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I selaku Bendahara Umum Negara (BUN) secara periodik yaitu setiap sebulan sekali. Dalam rekonsiliasi tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca yang disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sedangkan Kuasa BUN menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Selain itu telah dilaksanakan pula rekonsiliasi internal untuk membandingkan realisasi anggaran berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan Sistem Informasi Keuangan (SISKA).

3.2.

Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2020	
		Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%	94.81%

Indikator kinerja kedua yaitu “Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat” merupakan beberapa indikator yang ada pada 13 indikator IKPA, dimana nilai IKPA suatu instansi

AKUNTABILITAS KINERJA

mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanjanya terhadap kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Adapun untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja ini menggunakan rumus dimana jumlah SPM yang diterima oleh KPPN tanpa adanya kesalahan sama dengan jumlah SPM yang dikirim maka pengukuran persentase keakuratannya dikatakan akurat dan menunjukkan capaian kinerja yang baik, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase SPM yang Akurat} = \frac{\text{Jumlah SPM yang Akurat}}{\text{Jumlah SPM yang dikirim ke KPPN}} \times 100\%$$

Selanjutnya, perbandingan target dan capaian kinerja sasaran terkait jumlah persentase penyelesaian pnerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat pada tahun 2019 - 2020 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2019 - 2020

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan					
Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat					
TAHUN 2019			TAHUN 2020		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	98,41%	98,41%	95%	94,81%	99,8%

Pada tahun 2020 target Indikator persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat semula sebesar 100%, namun dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi di Sekretariat Kabinet, target tahun 2020 diubah menjadi 95%. Indikator dimaksud dihitung pada akhir tahun periode. Realisasi indikator kinerja "**Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat**" pada akhir tahun sebesar 94,81%, yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah SPM Akurat sebanyak 1.023 SPM dan jumlah SPM yang dikirim ke KPPN sebanyak 1.079 SPM. Jika membandingkan dengan targetnya, maka persentase capaian kinerja atas indikator kinerja dimaksud adalah sebesar **99,8%**. Berdasarkan tabel 3.14 di atas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil capaian dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini didorong oleh tekad Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memberikan kinerja terbaiknya dengan melakukan perbaikan pada keakuratan proses penerbitan SPM dengan optimal.

AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian kinerja dari kedua indikator yaitu kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat sudah dirasa sangat baik, dengan tetap kedepannya akan ditingkatkan kembali agar semua capaian yang ditargetkan dalam pencapaian sasaran tercapai sesuai dengan rencana.

B. Analisis Penggunaan Sumber Daya

1. Realisasi Anggaran

Pagu yang diperjanjikan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan pada periode tahun 2020 adalah sebesar Rp2.600.000.000,- Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	% REALISASI	% CAPAIAN KINERJA*
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran					
Sasaran 1	1.300.000.000	610.651.000	512.227.320	83,88%	103,64%
Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi					
Sasaran 2	800.000.000	179.955.000	98.407.660	54,68%	98,24%
Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan					
Sasaran 3	500.000.000	470.297.000	455.355.040	96,82%	99,90%
TOTAL	2.600.000.000	1.260.903.000	1.065.990.020	84,54%	100,59%

*rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp1.260.903.000,-, sampai dengan 31 Desember 2020 penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Rp1.065.990.020,- atau **84,54%**. Capaian anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020 belum dapat optimal hingga 90% dikarenakan tahun 2020 merupakan tahun pandemi, sehingga beberapa kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka harus dilakukan secara daring dalam upaya pencegahan penyalbaran virus covid-19.

Namun demikian, kinerja yang ditargetkan di awal tahun dapat dicapai dengan optimal, dapat dilihat dari capaian kinerja total sebesar **100,59%**. Persentase capaian kinerja total adalah rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian kinerja tersebut masuk ke dalam kategori **memuaskan**. Sehingga dapat

AKUNTABILITAS KINERJA

diinterpretasikan bahwa dalam kondisi pandemi, Biro Perencanaan dan Keuangan masih dapat melakukan penyerapan anggaran yang baik dengan diiringi capaian kinerja yang memuaskan pada tahun 2020.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan. Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2020 (termasuk pegawai tidak tetap) adalah sebanyak 29 orang dengan rincian selama tahun 2018-2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Keuangan

Jabatan	2018	2019	2020 Jan-Sep	2020 Okt-Des
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	1	1
Kepala Bagian Perencanaan	1	1	1	1
Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	1	1	1	1
Kepala Bagian Keuangan	1	1	1	1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran I	1	1	1	1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran II	1	1	1	1
Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I	1	1	1	1
Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II	1	1	1	-
Kepala Subbagian Verifikasi I	1	1	1	1
Kepala Subbagian Verifikasi II	1	1	1	1
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1	1	1	1
Bendahara Pengeluaran	1	1	1	1
Analisis Perencanaan	3	3	1	-
Analisis Keuangan	3	5	5	5
Analisis Laporan Keuangan	1	2	2	1
Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	4	2	2	3
Analisis Data dan Informasi	1	1	1	1
Pengolah Data	4	4	4	4
Pegawai Tidak Tetap	4	4	4	4
Jumlah	32	33	31	29

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Biro Perencanaan dan Keuangan selalu berusaha melaksanakan kinerja secara optimal dengan bantuan sumber daya manusia yang dimiliki. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2020, Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan rata-rata capaian berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yaitu sebesar **100,59%** dengan kategori **Memuaskan**. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran ini juga telah diimbangi dengan capaian penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Untuk itu pada tahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan dapat terus menyusun perencanaan anggaran yang komprehensif melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja sehingga dapat dihasilkan penyerapan anggaran yang optimal dan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

- 1 Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran.
- 2 Perlu adanya pengembangan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) untuk dapat mengakomodir penginputan capaian kinerja sesuai rencana secara periodik setiap bulan, dan diintegrasikan dengan SIPT (Sistem Informasi Persuratan Terpadu) untuk menghitung capaian kinerja unit kerja secara tersistem sehingga proses penghitungan capaian kinerja anggaran bisa lebih cepat.

PENUTUP

- 3 Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, termasuk perlunya ditunjuk satu orang penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring.
- 4 Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.
- 5 Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator/penanggung jawab/Fasilitasi Operasional anggaran dan pelaksana teknis unit kerja terkait pelaporan pelaksanaan anggaran dan kebijakan revisi anggaran.
- 6 Menginformasikan kepada unit kerja tentang mekanisme pengajuan revisi anggaran beserta dokumen kelengkapan lainnya melalui memorandum sehingga terdapat kesamaan format dokumen pengajuan revisi oleh unit kerja.
- 7 Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi/bimtek terkait agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.
- 8 Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum.

Berbagai upaya perbaikan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam membangun manajemen kinerja yang optimal di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Lampiran I.a

PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN JANUARI S.D. SEPTEMBER 2020



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua, Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85 Persen
		Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	80 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 Persen
		Persentase penyelesaian pemerbitan SPM yang diselesaikan secara akurat	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pr	
1. Penyusunan rencana kerja	Rp.1.300.000.000,-
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Rp.800.000.000,-
3. Pengelolaan perbendaharaan	Rp.172.245.000,-
4. Penyusunan laporan keuangan	Rp.327.755.000,-
Total Anggaran	Rp.2.600.000.000,-

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua, Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

Lampiran I.b

PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN OKTOBER S.D. DESEMBER 2020



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

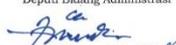
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.	85 Persen
		Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 Persen
		Persentase penyelesaian penerbitan SPM yang diselesaikan secara akurat	95 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pr	
1. Penyusunan rencana kerja	Rp.330.449.000,-
2. Pengelolaan perbendaharaan	Rp.169.553.400,-
3. Penyusunan laporan keuangan	Rp.119.307.000,-
Total Anggaran	Rp.619.309.400,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

Lampiran II.a

MATRIKS CAPAIAN KINERJA JANUARI S.D. SEPTEMBER 2020

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Kategori Pencapaian
Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%	-	-
Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	-	-
	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	80%	-	-
Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	-	-
	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	100%	-	-

Lampiran II.b

MATRIKS CAPAIAN KINERJA OKTOBER S.D. DESEMBER 2020

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Kategori Pencapaian
Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%	103,64%	Memuaskan
Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	96,05%	Sangat Baik
	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	80%	100,43%	Memuaskan
Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	Memuaskan
	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%	99,8%	Sangat Baik

Lampiran III

MATRIKS PENYERAPAN ANGGARAN

Deskripsi	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5=4÷3	6=3-4
Layanan Perencanaan	1.300.000.000	610.651.000	512.227.320	83,88%	98.423.680
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	800.000.000	179.955.000	98.407.660	54,68%	81.547.340
Layanan Manajemen Keuangan	500.000.000	470.297.000	455.355.040	96,82%	14.941.960
TOTAL	2.600.000.000	1.260.903.000	1.065.990.020	84,54%	194.912.980

